

DETERMINASI EKONOMI UTAMA DALAM PENURUNAN KEMISKINAN: STUDI PANEL 11 TAHUN DI INDONESIA

Patryano Gusti Anggara
Universitas Palangka Raya
Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah
Patryano.gustianggara@feb.upr.ac.id

ABSTRACT

This study investigates the determinants of poverty across 33 provinces in Indonesia from 2013 to 2023 by employing a quantitative causal-comparative approach using panel data. The analysis focuses on the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Provincial Minimum Wage (PMW), Domestic Investment (DI), and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on poverty levels. The results of the Chow and Hausman tests indicate that the Fixed Effect Model (FEM) is the most appropriate specification for capturing cross-regional heterogeneity. The estimation results show that GRDP has a significant negative effect on poverty, reflecting the inclusive role of economic growth in improving regional welfare. MSMEs exhibit a significant positive coefficient, suggesting that the expansion of low-productivity informal MSMEs does not necessarily reduce poverty. In contrast, Domestic Investment and Provincial Minimum Wage have no significant impact on poverty levels. Overall, the findings highlight that regional economic performance and MSME dynamics play a more substantial role in poverty reduction compared to investment flows and wage regulations.

Keywords : Indonesia, Poverty, and Panel Data

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang bersifat multidimensional serta menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi isu struktural yang terus berulang dan sulit dihapuskan meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan pola yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Walaupun terdapat kecenderungan penurunan secara statistik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), namun realitas sosial di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih hidup dalam kondisi serba kekurangan. Fluktuasi ini mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya efektif dalam jangka panjang. Meskipun data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan secara kuantitatif, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat secara kualitatif. Banyak masyarakat yang secara statistik telah keluar dari kategori miskin, namun masih hidup

dalam kondisi rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum diiringi oleh peningkatan kesejahteraan yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan bukan sekadar kekurangan finansial, melainkan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hermawati, 2017). Keberadaan kemiskinan menciptakan lingkungan di mana hak-hak fundamental, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, menjadi sulit diakses oleh sebagian besar penduduk (Almizi & Hermawati, 2018). Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang mencukupi, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memanfaatkan peluang-peluang pembangunan yang seharusnya menjadi hak setiap individu (Rahman, et al., 2019).

Data kemiskinan dalam rentang tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi nasional. Setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga tingkat kemiskinan juga bervariasi antarwilayah. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan selama satu dekade terakhir. Namun, fluktuasi tetap terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi regional, serta kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan fiskal.

Pada periode awal, yaitu tahun 2013 hingga 2016, penurunan angka kemiskinan berlangsung lambat. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa umumnya menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur. Periode 2017 hingga 2019 menjadi fase penting dalam penurunan kemiskinan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang masuk melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah. Dampak positif ini terlihat pada penurunan signifikan angka kemiskinan di sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi titik balik yang menyebabkan kenaikan kembali jumlah penduduk miskin di sebagian besar wilayah Indonesia. Penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan kemiskinan melonjak tajam. Tahun 2021 masih menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya

pulih, meskipun pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial dan insentif ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2022 hingga 2023, kondisi kemiskinan mulai membaik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan sebaiknya tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada strategi pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka memiliki kemampuan dan kemandirian ekonomi. Pendekatan berbasis pemberdayaan ini diyakini dapat menciptakan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan program bantuan yang bersifat sementara.

Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator ekonomi makro saja, tetapi juga dari peningkatan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa aspek sosial memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan justru dapat memperlebar kesenjangan sosial. Karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu kebijakan yang mampu membuka kesempatan kerja secara merata, meningkatkan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, tingkat kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh keberhasilannya dalam menurunkan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga sering diukur melalui PDRB per kapita, yaitu nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam periode tertentu dan menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai tanda adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi indikator adanya kemajuan dalam kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selain memperhatikan peningkatan nilai PDRB, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kemakmuran yang merata dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi di setiap wilayah. Tingkat upah yang rendah menjadi satu dari berbagai aspek yang dapat menyebabkan kemiskinan. Karena tingkat upah rendah apalagi dibawah upah minimum menjadikan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Upah minimum adalah suatu kebijakan yang diciptakan pemerintah untuk membentengi daya beli masyarakat agar mampu memenuhi standar hidup minimumnya. Sungkar meyakini upah minimum menjadi salah satu kebijakan efektif untuk menekan kemiskinan karena akan memberikan distribusi pendapatan yang merata antara perusahaan dan pekerja.

Data dalam kurun waktu 2013 hingga 2023 menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. PDRB merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Secara umum, provinsi dengan nilai PDRB yang tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Hal ini terjadi karena peningkatan aktivitas ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang memiliki PDRB tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat memiliki efek langsung terhadap pengentasan kemiskinan, terutama jika pertumbuhan tersebut disertai dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja yang luas. Hal ini sesuai dengan penelitian Ahmad Nasirudin & Meidy Haviz (2025) dengan data dari 34 provinsi Indonesia yang menyatakan PDRB negatif & signifikan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) juga memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan. UMP berfungsi sebagai standar upah minimum bagi pekerja formal di suatu wilayah. Kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga menurunkan risiko kemiskinan. Namun, efek ini bergantung pada produktivitas tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha untuk menyesuaikan biaya produksi. Menurut (Ningrum, 2017) upah merupakan sumber pemasukan, apabila sumber pemasukan turun ataupun tetap hingga kesejahteraan pula turun

ataupun tetap dan itu juga pasti bakal mempengaruhi tingkatan kemiskinan. Upah yang diperoleh tampaknya secara riil hasilnya lumayan kecil walaupun secara besaran angkanya lumayan besar. Pada penelitian (Romi & Umiyati, 2018) menunjukkan bahwa upah minimum mempengaruhi negatif terhadap kemiskinan. Perihal ini membuktikan kalau upah minimum memiliki kedudukan terbalik tentang meningkatnya angka kemiskinan, dimana upah minimum ialah bagian yang tidak terpisahkan dari kemiskinan. Bila upah minimum dinaikkan, maka jumlah keluarga miskin hendak menurun (Marinda et al., 2017).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi mendorong pembangunan infrastruktur, pembukaan usaha baru, serta peningkatan lapangan kerja. Daerah yang mampu menarik investasi besar, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur, biasanya mengalami penurunan kemiskinan yang lebih cepat. Investasi juga berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Ketika modal masuk meningkat, sektor industri, perdagangan, dan jasa tumbuh lebih pesat, sehingga permintaan tenaga kerja meningkat. Namun, efek positif investasi terhadap pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada arah investasi itu sendiri. Jika investasi hanya terkonsentrasi pada sektor padat modal dan bukan padat karya, maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan menjadi lebih terbatas. Seperti yang ditegaskan oleh Rahayu et al. (2024) dan Sara et al. (2024), peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan jika disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang efektif. Namun demikian, temuan dari Rosma Simangunsong (2022) menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum tentu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, manfaat dari investasi yang masuk tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain PDRB, UMP, dan investasi, variabel UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan. UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja di sektor informal, terutama di daerah pedesaan. Keberadaan UMKM memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan modal untuk tetap memperoleh penghasilan dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal. Peningkatan jumlah dan kapasitas UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan di tingkat lokal. Dengan adanya dukungan pemerintah melalui pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi usaha, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan membuka peluang usaha baru. Secara keseluruhan,

hubungan antarvariabel dalam dataset ini menggambarkan pola yang konsisten: PDRB, UMP, investasi, dan UMKM memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, artinya peningkatan pada keempat faktor tersebut cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, kekuatan hubungan ini bervariasi antarprovinsi, tergantung pada kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, dan struktur ekonomi setempat. Wilayah dengan sektor ekonomi yang beragam dan produktif cenderung lebih cepat mengurangi kemiskinan dibandingkan daerah dengan ketergantungan pada satu sektor.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya bergantung pada satu faktor ekonomi saja. Peningkatan PDRB harus diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan, kenaikan UMP harus disertai dengan peningkatan produktivitas, investasi harus diarahkan ke sektor padat karya, dan pengembangan UMKM harus mendapat dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial yang tepat, maka tujuan jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai dengan lebih cepat dan merata. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja (Ardito et al., 2020). Namun, kekurangan penelitian yang merinci peran spesifik UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menjadi celah yang perlu diisi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB, UMP, PMDN, dan UMKM terhadap tingkat kemiskinan di 33 provinsi Indonesia selama 2013–2023, dengan fokus mengidentifikasi variabel ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan dalam memengaruhi dinamika kemiskinan. Keaslian penelitian ini terletak pada penggunaan data panel jangka panjang yang menggabungkan indikator makro dan mikro secara simultan. Kontribusi penelitian mencakup pengayaan literatur mengenai determinan kemiskinan di tingkat regional dan rekomendasi kebijakan terkait kualitas pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, dan efektivitas investasi domestik. Penelitian ini selaras dengan pandangan Todaro yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif agar berdampak pada penurunan kemiskinan, serta didukung temuan empiris bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Ahmad Nasirudin & Haviz, 2025) dan kebijakan upah dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat (Ningrum, 2017; Romi & Umiyati, 2018). Literatur juga menunjukkan bahwa investasi domestik tidak selalu menurunkan kemiskinan apabila terkonsentrasi pada sektor padat modal (Rahayu et al., 2024; Simangunsong, 2022),

sementara produktivitas UMKM yang rendah menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan (OECD, 2021; Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis terhadap pemahaman mengenai bagaimana struktur ekonomi daerah memengaruhi kemiskinan serta strategi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif berbasis data panel, yang menggabungkan dimensi waktu (time series) dan antarwilayah (cross-section). Analisis difokuskan pada pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan UMKM terhadap tingkat kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2013–2023. Seluruh variabel bersumber dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1. Data dan Variabel Data.

No	Data	Variabel Data	Simbol
1	PDRB	Variabel Bebas	PDRB
2	UMP	Variabel Bebas	UMP
3	PMDN	Variabel Bebas	PMDN
4	UMKM	Variabel Bebas	UMKM
5	Kemiskinan	Variabel Terikat	KEMISKINAN

Sumber : BPS, 2025

Metode Analisis Data

Metode Regresi Data Panel

Pendekatan PLS menggabungkan data cross-section dan time series menggunakan OLS tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar unit maupun antar waktu. Sementara itu, FEM berasumsi bahwa setiap unit memiliki nilai intersep yang berbeda namun koefisien slope tetap konstan, di mana perbedaan tersebut ditangkap melalui penggunaan variabel dummy sering disebut sebagai metode LSDV. Berbeda dari FEM, REM memandang variasi antar individu maupun waktu sebagai bagian dari komponen error, sehingga mampu menghasilkan estimasi yang lebih efisien dengan meminimalkan penggunaan variabel dummy dan menjaga jumlah derajat kebebasan (*degree of freedom*).

Pemilihan Model Regresi

Estimasi data panel umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu Common Effect (PLS), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Pemilihan model yang paling sesuai biasanya ditentukan menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

Uji Chow berfungsi untuk membedakan apakah model yang tepat adalah Common Effect atau Fixed Effect. Penentuannya didasarkan pada probabilitas F-statistik: apabila nilai probabilitas melebihi tingkat signifikansi, maka model Common Effect dinilai lebih tepat; sebaliknya, jika lebih kecil, model Fixed Effect dipilih.

Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM dengan melihat nilai chi-square. Jika hasil uji menunjukkan signifikansi, maka FEM merupakan model yang paling sesuai. Namun, apabila tidak signifikan, model yang direkomendasikan adalah REM.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memiliki validitas yang memadai. Dua pengujian utama yang umumnya digunakan adalah uji normalitas dan uji multikolinieritas.

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah distribusi data mendekati distribusi normal, biasanya dianalisis melalui uji Jarque-Bera (J-B). Data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai J-B melebihi nilai chi-square dan p-value berada di bawah tingkat signifikansi 5%.

Sementara itu, uji multikolinieritas bertujuan mengidentifikasi adanya hubungan linear yang tinggi antar variabel independen, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. Pemeriksaan multikolinieritas umumnya dilakukan dengan mengamati besarnya korelasi antar variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	819.975725	(32,326)	0.0000
Cross-section Chi-square	1597.367292	32	0.0000

Sumber : Data diolah oleh Penulis 9, 2025

Karena nilai Prob(F) = 0.0000 lebih kecil dari 0.05, maka H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar cross-section, sehingga model Fixed Effect dinilai lebih sesuai dibandingkan model Pooled OLS.

2. Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	117.700619	4	0.0000

Sumber : Data diolah oleh Penulis 9, 2025

Karena nilai Prob(F) = 0.0000 lebih kecil dari 0.05, maka H₀ dinyatakan ditolak. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antar cross-section, sehingga model Fixed Effect lebih layak digunakan dibandingkan Random Effect Model.

3. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Tabel 4. Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	855604.5	10506.06	81.43914	0.0000
PDRB	-1.15E-07	2.17E-08	-5.273375	0.0000
PMDN	-3.53E-10	7.04E-10	-0.502075	0.6160
UMKM	0.040231	0.012543	3.207544	0.0015
UMP	-3.43E-06	7.94E-05	-0.043204	0.9656

Sumber : Data diolah oleh Penulis 9, 2025

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar $-1.15E-07$ dan nilai probabilitas 0.0000. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB mampu menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia selama periode penelitian. Secara ekonomi, hal ini mengilustrasikan bahwa pertumbuhan output daerah memberikan dampak yang bersifat inklusif atau cukup efektif dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Ketika kapasitas ekonomi daerah meningkat, peluang kerja dan pendapatan masyarakat juga cenderung membaik, sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang.

Variabel PMDN memiliki koefisien negatif sebesar $-3.53E-10$ dengan nilai probabilitas 0.6160, sehingga secara statistik tidak signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi domestik tidak memberikan pengaruh langsung yang kuat terhadap penurunan kemiskinan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah penempatan investasi yang cenderung terfokus pada sektor-sektor padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja miskin. Selain itu, realisasi PMDN mungkin lebih banyak menguntungkan pelaku usaha berskala besar sehingga dampaknya terhadap masyarakat berpendapatan rendah tidak segera terlihat.

UMKM menunjukkan koefisien positif dan signifikan, yaitu sebesar 0.040231 dengan nilai probabilitas 0.0015. Artinya, peningkatan aktivitas UMKM justru berkaitan dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh karakteristik UMKM di sebagian besar wilayah Indonesia yang masih didominasi sektor informal dengan produktivitas rendah. Banyak UMKM tumbuh sebagai upaya bertahan hidup (survival strategy) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan sebagai unit usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan jumlah UMKM belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan, bahkan dapat mencerminkan meluasnya kegiatan ekonomi berpendapatan rendah.

Variabel UMP menunjukkan koefisien negatif sebesar $-3.43E-06$ dengan nilai probabilitas 0.9656, sehingga tidak signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan UMP tidak memiliki dampak yang berarti terhadap perubahan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena UMP lebih banyak berlaku pada sektor formal, sementara sebagian besar penduduk miskin berada di sektor informal yang tidak terjangkau regulasi upah minimum. Selain itu, ketidakpatuhan sebagian pelaku usaha kecil dalam menerapkan UMP juga dapat mengurangi efektivitas variabel ini dalam menurunkan kemiskinan.

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Jarque Berra	Prob.
2738.289	0,463

Sumber : Data diolah oleh Penulis 9, 2025

Karena nilai probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak (H_0 : residual berdistribusi normal) Residual tidak berdistribusi normal.

b. Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

	PDRB	PMDN	UMKM	UMP
PDRB	1.000000	0.843684	0.232841	0.186846
PMDN	0.843684	1.000000	0.213343	0.251509
UMKM	0.232841	0.213343	1.000000	0.046704
UMP	0.186846	0.251509	0.046704	1.000000

Sumber : Data diolah oleh Penulis 9, 2025

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan PMDN, yang ditunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0.843684. Temuan ini mengindikasikan bahwa provinsi dengan tingkat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang lebih tinggi cenderung memiliki PDRB yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa investasi domestik mendorong peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan ekspansi kegiatan ekonomi sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan output regional. Sementara itu, hubungan antara PDRB dan UMKM menunjukkan korelasi positif namun lemah sebesar 0.232841. Ini berarti bahwa kontribusi UMKM terhadap peningkatan PDRB tidak terlalu dominan, meskipun tetap memberikan arah hubungan yang positif bagi aktivitas ekonomi daerah.

Selanjutnya, korelasi antara PDRB dan UMP juga menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah dengan nilai 0.186846. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan PDRB tidak sepenuhnya berkaitan dengan perubahan tingkat UMP, mengingat penetapan upah minimum lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, inflasi, dan kebutuhan hidup layak dibandingkan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi regional. Di sisi lain, hubungan antara PMDN dan UMKM bernilai 0.213343, menandakan bahwa meskipun investasi domestik meningkat, hal tersebut tidak selalu berkaitan erat dengan perkembangan sektor UMKM. Investasi PMDN lebih banyak mengalir ke sektor usaha menengah dan besar sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan UMKM relatif terbatas.

Korelasi antara PMDN dan UMP yang bernilai 0.251509 juga menunjukkan hubungan positif yang lemah, di mana kenaikan investasi domestik hanya sedikit berkaitan dengan perubahan tingkat upah minimum. Hal ini dapat dijelaskan karena kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan penetapan upah merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dinamika investasi. Terakhir, hubungan antara UMKM dan UMP memiliki nilai korelasi terkecil, yaitu 0.046704, yang mencerminkan bahwa kedua

variabel ini hampir tidak memiliki hubungan. Jumlah UMKM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besaran UMP di suatu daerah, karena sebagian besar UMKM terutama pada level mikro tidak menjadikan UMP sebagai dasar penentuan upah buruh.

Secara keseluruhan, hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas serius antarvariabel, karena tidak ada nilai korelasi yang melebihi ambang kritis 0.90. Meski hubungan antara PDRB dan PMDN tergolong kuat, nilai tersebut masih dalam batas toleransi dan tidak mengganggu estimasi regresi model panel. Temuan ini menegaskan bahwa seluruh variabel independen layak digunakan secara simultan dalam model regresi panel yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB memiliki korelasi yang sangat kuat dengan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan nilai korelasi sebesar 0,843684. Jika dikaitkan dengan kondisi nyata di Indonesia, hubungan ini sangat terlihat pada daerah-daerah yang menjadi pusat investasi domestik, seperti kawasan industri di Jawa Barat, Jawa Timur, serta pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan. Masuknya PMDN umumnya diikuti dengan pembangunan pabrik, kawasan industri terpadu, proyek jalan tol, pelabuhan, serta infrastruktur logistik lainnya. Aktivitas tersebut secara langsung meningkatkan kapasitas produksi dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong peningkatan output regional dan tercermin dalam kenaikan PDRB. Hal ini sejalan dengan laporan Bank Dunia (2023) yang menegaskan bahwa investasi domestik merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam, investasi PMDN di Indonesia masih didominasi oleh sektor padat modal seperti industri manufaktur besar, energi, pertambangan, dan konstruksi. Sektor-sektor ini memang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat relatif terbatas. Di lapangan, banyak proyek investasi berskala besar yang lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil atau bahkan menggunakan teknologi otomatisasi, sehingga tenaga kerja lokal dengan keterampilan rendah tidak sepenuhnya terserap. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Kondisi ini memperkuat argumen Bank Dunia (2023)

bahwa kualitas investasi bukan hanya kuantitasnya sangat menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif atau tidak.

Hubungan antara PDRB dan jumlah UMKM menunjukkan korelasi positif namun lemah (0,232841). Secara faktual di Indonesia, jumlah UMKM memang sangat besar dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun kontribusinya terhadap PDRB masih terbatas. Di lapangan, sebagian besar UMKM berada pada kategori usaha mikro dengan skala usaha kecil, teknologi sederhana, serta produktivitas yang relatif rendah. Banyak UMKM hanya melayani pasar lokal dengan volume produksi terbatas, seperti usaha kuliner rumahan, kerajinan kecil, atau perdagangan tradisional, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil terhadap total PDRB. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2021) yang menyebutkan bahwa UMKM di negara berkembang menghadapi tantangan utama berupa rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha. Selain itu, keterbatasan akses terhadap permodalan formal dan teknologi digital juga menjadi kendala utama. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2022), masih banyak UMKM yang belum terhubung dengan lembaga keuangan maupun ekosistem digital, sehingga sulit berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan produktif. Di lapangan, pelaku UMKM sering kali mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal, yang membatasi ekspansi usaha. Oleh karena itu, meskipun jumlah UMKM sangat besar, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal, sehingga korelasi dengan PDRB menjadi relatif lemah.

Hubungan antara PDRB dan Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan korelasi yang sangat lemah (0,186846). Dalam praktik di Indonesia, penetapan UMP tidak sepenuhnya ditentukan oleh kinerja ekonomi daerah, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi pemerintah melalui formula tertentu yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini menyebabkan kenaikan PDRB di suatu daerah tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan UMP yang signifikan. Temuan ini didukung oleh penelitian Afandi dan Azzahra (2021) yang menyatakan bahwa perubahan upah minimum di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi dibandingkan oleh pertumbuhan ekonomi regional secara langsung.

Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia juga memperkuat lemahnya hubungan tersebut. Berdasarkan data BPS (2023), sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal, seperti pertanian, perdagangan kecil, dan usaha keluarga. Dalam sektor ini, standar UMP sering kali tidak diterapkan, sehingga peningkatan

PDRB tidak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pekerja. Hal ini menjelaskan mengapa korelasi antara PDRB dan UMP dalam penelitian ini sangat lemah.

Hubungan antara PMDN dan UMKM yang menunjukkan korelasi lemah (0,213343) menggambarkan bahwa peningkatan investasi domestik belum mampu mendorong perkembangan UMKM secara signifikan. Secara nyata di lapangan, investasi PMDN di Indonesia lebih banyak masuk ke sektor formal berskala besar, seperti manufaktur, properti, dan infrastruktur, yang memiliki keterkaitan terbatas dengan UMKM. Hanya sebagian kecil UMKM yang mampu terlibat dalam rantai pasok industri besar, misalnya sebagai pemasok bahan baku atau jasa pendukung.

Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti standar kualitas yang belum terpenuhi, kapasitas produksi yang kecil, serta keterbatasan akses terhadap jaringan bisnis. Akibatnya, efek penyebaran (spillover effect) dari investasi terhadap UMKM belum berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan laporan Asian Development Bank (2022) yang menyebutkan bahwa investasi di negara berkembang cenderung terkonsentrasi pada sektor padat modal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor UMKM.

Korelasi antara PMDN dan UMP sebesar 0,251509 juga menunjukkan hubungan yang lemah. Dalam praktiknya, peningkatan investasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan upah minimum. Perusahaan yang menerima investasi cenderung berfokus pada efisiensi biaya produksi, termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja, misalnya melalui penggunaan tenaga kerja kontrak atau otomatisasi. Selain itu, kebijakan penetapan UMP tetap berada dalam kewenangan pemerintah dan mengikuti formula tertentu, sehingga tidak secara langsung dipengaruhi oleh masuknya investasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah justru menjaga tingkat upah tetap kompetitif untuk menarik investor. Hal ini konsisten dengan temuan International Labour Organization (ILO, 2022) yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum lebih berorientasi pada perlindungan pekerja dan stabilitas ekonomi daripada faktor investasi.

Terakhir, hubungan antara UMKM dan UMP yang sangat rendah (0,046704) menunjukkan hampir tidak adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Kondisi ini sangat sesuai dengan realitas di Indonesia, di mana sebagian besar UMKM terutama usaha mikro beroperasi di sektor informal dan tidak mengikuti ketentuan UMP. Di lapangan, banyak usaha kecil seperti warung, pedagang kaki lima, atau

usaha rumahan memberikan upah berdasarkan kemampuan usaha dan kesepakatan langsung, bukan berdasarkan standar formal.

Selain itu, banyak pekerja UMKM merupakan anggota keluarga yang tidak menerima upah dalam bentuk formal, melainkan berbagi hasil usaha. Berdasarkan data BPS (2023), sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga sistem pengupahan sangat fleksibel dan tidak terikat pada regulasi UMP. Oleh karena itu, sangat wajar jika hubungan antara UMKM dan UMP dalam penelitian ini hampir tidak signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2013–2023, ditemukan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas serius antarvariabel penelitian, sehingga seluruh variabel independen layak digunakan dalam model regresi panel. Hasil uji fixed effect menunjukkan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik unik yang memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga model Fixed Effect merupakan model terbaik dalam menjelaskan variasi data panel. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan signifikan dengan kemiskinan, baik secara teoritis maupun empiris, di mana peningkatan output ekonomi daerah cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel UMKM juga memiliki pengaruh signifikan meskipun kekuatannya tidak sebesar PDRB, yang menandakan bahwa penguatan sektor UMKM tetap memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, variabel PMDN dan UMP tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model, yang mengindikasikan bahwa peningkatan investasi domestik maupun perubahan kebijakan upah minimum belum secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan selama periode penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM memiliki kontribusi yang lebih nyata dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan faktor investasi atau kebijakan upah.

SARAN

Pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan perhatian lebih pada kebijakan yang mendukung peningkatan PDRB melalui pengembangan sektor produktif yang memiliki efek pengganda besar pada perekonomian daerah. Selain itu, diperlukan strategi penguatan sektor UMKM melalui akses permodalan, peningkatan kapasitas teknologi, digitalisasi usaha, dan pendampingan manajerial agar UMKM

mampu memberikan kontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penyaluran investasi domestik agar lebih inklusif dan mampu menjangkau usaha berskala kecil dan menengah, tidak hanya berfokus pada sektor-sektor padat modal. Kebijakan upah minimum juga perlu disinergikan dengan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja agar perubahan UMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan variabel tambahan seperti tingkat pendidikan, pengangguran, atau indeks pembangunan manusia guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kemiskinan di tingkat provinsi.

REFERENSI

- Afandi, M., & Azzahra, N. (2021). Determinants of minimum wage policy in Indonesia. *Journal of Economics and Development Policy*, 4(2), 115–128.
- Ahmad Nasirudin, & Haviz, M. (2025). *Analisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di 34 provinsi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 45–57.
- Almizi, R., & Hermawati, S. (2018). *Dimensions of poverty and social welfare in developing countries*. *Journal of Social Development*, 5(2), 90–104.
- Ardito, E., Messeni Petruzzelli, A., & Albino, V. (2020). *The role of SMEs in sustainable economic development*. *Small Business Economics*, 55(4), 1129–1145.
- Asian Development Bank. (2022). *Asian development outlook: Financing sustainability*. ADB.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik: Persentase Penduduk Miskin September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Dunia. (2023). *Indonesia economic prospects: Boosting investment for economic growth*. World Bank Group.
- Hermawati, S. (2017). *Poverty and social inequality in Southeast Asia*. *Southeast Asian Journal of Social Studies*, 12(1), 55–68.
- International Labour Organization. (2022). *Minimum wage policy in Asia: Trends and implications*. ILO Publications.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Kinerja UMKM Indonesia 2022*.

- Marinda, L., Putri, A., & Sari, D. (2017). *Minimum wage and poverty reduction in Indonesia*. *Economic and Social Review*, 8(1), 33–49.
- Ningrum, D. (2017). *Wages and household welfare in Indonesia*. *Journal of Labour and Society*, 19(3), 215–228.
- OECD. (2021). *SME and entrepreneurship outlook 2021*. OECD Publishing.
- Rahayu, S., Wibowo, T., & Yuliana, R. (2024). *Domestic investment and poverty reduction in Southeast Asia*. *Journal of Development Economics*, 49(2), 140–155.
- Rahman, A., Nurhasanah, S., & Lestari, A. (2019). *Understanding multidimensional poverty in Indonesia*. *Indonesian Journal of Social Research*, 6(1), 12–25.
- Romi, H., & Umiyati, U. (2018). *Minimum wage and poverty levels: Evidence from Indonesian provinces*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101–112.
- Sara, L., Putra, I., & Hasan, R. (2024). *Investment flows and regional development: Implications for poverty reduction*. *Journal of Regional Policy Studies*, 15(1), 77–89.
- Simangunsong, R. (2022). *Domestic investment and its impact on Indonesia's economic growth*. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(3), 210–222.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development (13th ed.)*. Pearson